

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Adrian Sutedi. 2010. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarnya Cetakan 4*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Agenda 21 Indonesia. 1996. *Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Ahmad Setiawan. 2019. *Hukum Pertanahan (Pengaturan, Problematika dan Reformasi Agraria)*. LaksBang Justitia. Yogyakarta.
- Aminuddin Salle dkk. 2011. *Bahan Ajar Hukum Agraria Cetakan Kedua*, Aspublishing. Makassar.
- Bambang Eko Supriyadi. 2014. *Hukum Agraria Kehutanan (Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara)*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya (Jilid 1 Hukum Tanah Nasional)*. Djambatan. Jakarta.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Farida Patittingi. 2012. *Dimesi Hukum Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia, Rangkang Education*. Yogyakarta.
- Fifik Wiryani. 2018. *Hukum Agraria (Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial hingga Kemerdekaan)*. Setara Press Kelompok Intrans Publishing. Malang.
- Hambali Thalib. 2009. *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana Edisi Pertama Cetakan Ke-2*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Ida Ayu Pradnya Resosudarmo dkk. 2003. *Ke mana Harus Melangkah, Masyarakat Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Idris Sarong Al Mar. dalam Salim. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Moh.Hatta. 2014. *Bab-Bab Tentang Perolehan & Hapusnya Hak Atas Tanah Cetakan Pertama*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.

Muchsan. 1992. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha di Indonesia*. Penerbit Liberty. Yogyakarta.

Muhammad Badai Anugrah. 2020. *Hentikan Kriminalisasi Petani di Kawasan Hutan*. Guepedia.

Robert Lawang. 1994. *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*. Universitas Terbuka. Jakarta.

Sudikno M. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.

Supriadi. 2007. *Hukum Agraria, Edisi 1*. Sinar Grafika Offset. Jakarta.

Supriadi. 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Titik Triwulan Tutik. 2010. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Prenada Group. Jakarta.

Urip Santoso. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah (Edisi Pertama Cetakan ke-2)*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.

Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif Edisi Pertama*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.

#### **TESIS:**

Bachtiar, Nur Annisa, 2020, "Perindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Tradisional Di Hutan Laposso Nini Conang Desa Umpungeng Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng". Thesis-S2 thesis, Universitas Hasanuddi. Makassar.

#### **JURNAL:**

Achmad Rizal HB dkk. *Kajan Strategi Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Hutan Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan*. Jurnal Penelitian Sosial

dan Ekonomi Kehutanan. BPK Makassar. Vol.9. Nomor 4 Desember 2012.

Amaliyah dkk. *Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah*. Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika, Fakultas Hukum Unhas, Vol.5, Nomor 1. Februari 2021.

Azhari Ramadhan dkk. *Profil Defortasi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. Jurnal Ilmu Kehutanan Mahasiswa Laboratorium Perencanaan dan Sistem Informasi Kehutanan. Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Dewa Nyoman Rai Asmara P. dkk. *Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif*. Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, Vol.6, Nomor 1. Januari-Juni 2002.

Mustamin. *Studi Konflik Sosial di Desa Bugis dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014*. Jurnal Ilmiah Mandala Education. STKIP Bima. Vol.2. Nomor 2 Oktober 2016.

Nurdin M. *Akar Konflik Pertanahan di Indonesia*. Jurnal Hukum Positum, Vol.3.Nomor.2,2018,126-141.  
<https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2897>

Rosmidah, Rosmidah. *Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia*. Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.6. Nomor.2. 2013.

Rosita. *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)*. Journal OfIslamic Law. Institut Agama Islam Bone. Vol.6.Nomor.2.2017.

Wibowo T. Tunardy. *Hak Milik*. Jurnal Hukum. 2013.

#### **INTERNET:**

Anonim. <http://e-journal.uajy.ac.id/361/3/2MIH01442.pdf>, diakses pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 15:03 WITA.

Damang Averroes Al-Khawarizmi. *Pengertian Penguasaan Tanah*. Negarahukum.com. 4 November 2011.  
<http://www.negarahukum.com/pengertian-penguasaan-tanah.html>, diakses pada tanggal 9 Maret 2021 Pukul 14:04 WITA.

Kelurahan Bila. *Profil Kelurahan*. <https://lalabata.soppengkab.go.id/potensi-wilayah/> , diakses pada tanggal 23 Juni 2021 . pukul 08.50 WITA

Lalabata                      Soppeng.                      *Potensi*                      *Wilayah*.  
<https://lalabata.soppengkab.go.id/potensi-wilayah/>,                      diakses  
pada tanggal 22 Juni 2021. pukul 22.23 WITA.

R.A.M. Advocates & Legal Consultants. *Jenis-Jenis Sengketa Pertanahan*.  
10 September 2017. <https://kantorpengacara-ram.com/jenis-jenis-sengketa-pertanahan/>, diakses pada tanggal 22 September  
2021 Pukul 07.35 WITA.

Sosiologi, Dosen. *20 Jenis konflik dan Contohnya di Masyarakat dalam Keseharian*.  
DosenSosiologi.com. 31 Maret 2019  
<https://dosensosiologi.com/jenis-konflik/> , diakses pada tanggal  
2 Maret 2021 Pukul 08.15 WITA.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

*Burgerlijk Wetboek (BW)*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012.

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.434/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi Selatan.

# LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG  
KECAMATAN LALABATA  
KELURAHAN BILA  
*Jalan Bila Selatan Nomor 50 Watansoppeng, 90814*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor :331 / KBL / XII / 2021

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARIADI, SE, MM.  
Jabatan : Lurah Bila  
Instansi : Kelurahan Bila  
Alamat : Jl. Bila Selatan No.50, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : YUSTIKA DELIANA  
NIM : B11116091  
Fakultas / Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Hasanuddin

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul : **TINJAUAN HUKUM KONFLIK PENGUASAAN TANAH ANTARA PETANI ALE' SEWO DENGAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) WALANAE (STUDI KASUS KELURAHAN BILA, KABUPATEN SOPPENG)** Sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021, dan telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Bila, 21 Desember 2021



NIP. 41171015 200502 1 004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS KEHUTANAN

**UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WALANAE**

Jl. Kayangan Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 522/358/KPH-XII/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. Muhammad Junan, S.Hut, IPM  
Jabatan : Kepala UPT KPH Walanae  
Instansi : Dinas Kehutanan  
Alamat : Jalan Kayangan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yustika Deliana  
NIM : B111 16 091  
Fakultas / Prodi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Hasanuddin

Adalah benar telah melakukan penelitian sejak tanggal 23 – 30 Desember 2020, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM KONFLIK PENGUASAAN TANAH ANTARA PETANI ALE' SEWO DENGAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) WALANAE (STUDI KASUS KELURAHAN BILA KABUPATEN SOPPENG)**. Dan telah membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Soppeng, 30 Desember 2020

KEPALA UPT KPH WALANAE

  
Ir. H. MUHAMMAD JUNAN, S.Hut, IPM  
NIP.197701211996031003





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**  
**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII**  
Jalan Prof. Dr. Abdurrahman Basalamah Kotak Pos 1009 Telp. (0411) 441233 Fax. 43605

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**NOMOR : S. 223 / BPKH. VII / TU / 08 / 2022**

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, di Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hariani Samal, S.Hut., M.Si.  
NIP : 19731011 199803 2 007  
Pangkat / Gol : Pembina Tk. I / IV.b  
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa :

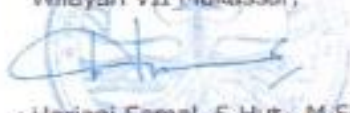
2. Nama : Yustika Defiana  
Nomor Pokok : B11116091  
Alamat : Jl. Sepakat Kera-Kera Unhas  
Program : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum

Benar telah melakukan penelitian pada Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar sejak tanggal 31 Januari - 11 Februari 2022 dalam rangka penyelesaian skripsi dengan Judul : **"TINJAUAN HUKUM KONFLIK PENGUASAAN TANAH ANTARA PETANI ALE' SEWO DENGAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) WALANAE (STUDI KASUS KELURAHAN BILA KABUPATEN SOPPENG)"**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 25 Februari 2022

Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan  
Wilayah VII Makassar,

  
Hariani Samal, S.Hut., M.Si.  
NIP. 19731011 199803 2 007

## Dokumentasi Wawancara

### 1. Wawancara dengan masyarakat petani kampung Ale' Sewo



Ario Permadi (Anak Natu), Petani Ale' Sewo, 2 Desember 2021.



Habaria (Petani Ale' Sewo), 2 Desember 2021.



Sudirman (Petani Ale' Sewo), 4 Desember 2021.



Sabang (Ipar Natu), Petani Ale' Sewo, 4 Desember 2021.



Mustamin (Ketua Rukun Tetangga (RT) Lingkungan Ale' Sewo), 5 Desember 2021.



Pamme (Ketua Rukun Warga (RW) Lingkungan Ale' Sewo), 5 Desember 2021.



Isulo (Masyarakat Kampung Ale' Sewo), 6 Desember 2021.



Mariam (Masyarakat Kampung Ale' Sewo), 6 Desember 2021.



Natu (Pemilik tanah yang berkonflik), Petani Ale' Sewo, 8 Desember 2021.



Jumiati (Masyarakat Kampung Ale' Sewo), 8 Desember 2021.



Area tanah atau kebun yang menjadi objek konflik, 2021.

## 2. Wawancara dengan aparat Kelurahan Bila Kabupaten Soppeng



Nurul Azmi (Lurah Kelurahan Bila periode 2019-2021), 16 Desember 2021.



Sunarto (Kepala Seksi (KASI) Pemerintahan Kelurahan Bila), 18 Desember 2021.



3. Wawancara dengan pegawai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)  
Walanae Kabupaten Soppeng



Muhammad Junan (Kepala KPH Walanae Kabupaten Soppeng), 24 Desember 2021.



Alif Sutami (Polisi Kehutanan (POLHUT) KPH Walanae Kabupaten Soppeng, 28 Desember 2021.

4. Wawancara dengan staf Balai Pemantapan Kawasan Hutan  
(BPKH) VII Wilayah Makassar



Yusuf Mangaliki (Bagian pengukuran dan pemetaan BPKH Wilayah VII Makassar),  
5 Februari 2022.

Wawancara Via Daring

Riski Adi Putra Salim (Bagian pengelolaan SIG seksi ISDHL BPKH Wilayah VII  
Makassar), 9 Februari 2022.